

Article

Pengelolaan *Marine Protected Area*

Alifiya Rizki¹

¹ Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran;

* Correspondence: alifiyarizki2018@gmail.com

Abstract: Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dianggap sebagai salah satu pendorong utama untuk penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pengembangan KKP dilakukan secara bersama-sama namun masih belum terlalu sederhana dan jelas. Hal ini karena kawasan konservasi laut merupakan instrumen penting untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati laut. Negara-negara yang serius dalam pengembangan KKP menghindari kerusakan lingkungan laut yang dapat terjadi jika tidak ditangani dengan serius. Terdapat hubungan antara kawasan konservasi dengan pembangunan ekonomi suatu negara, di mana pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik dapat merusak lingkungan. Pengelolaan KKP merupakan masalah kompleks karena menyangkut kelestarian lingkungan dan pengembangan pola pikir masyarakat. Banyak komunitas perlindungan laut dan Taman Nasional yang menjaga area untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya alam. Selain menjaga lingkungan, KKP juga memiliki potensi untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup masyarakat lokal sambil melestarikan habitat alami. Inisiatif konservasi juga bersifat sosial karena melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang penting untuk sistem dan aktivitas yang mendukung kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan juga menggabungkan konsep kesetaraan, meningkatkan kapasitas, keterlibatan, mobilitas ke atas, dan harmoni sosial. KKP harus dapat mempromosikan ekonomi, sosial, dan perbaikan budaya bersama dengan konservasi. Kesadaran dan sikap lingkungan juga penting dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Membangun kesadaran lingkungan dapat dicapai melalui berbagi informasi di antara anggota komunitas. Pengelolaan berbasis masyarakat adalah salah satu mekanisme yang menciptakan tingkat kesadaran tertentu dan perubahan sikap dan perilaku di antara orang-orang lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, KKP dapat memberikan dampak positif dalam melindungi ekosistem laut dan meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan.

Citation: Rizki, Alifiya. Pengelolaan *Marine Protected Area*. *JOANE Vol. 02 No. 01 January 2024*, p22-27.
<https://doi.org/10.56855/joane.v2i1.964>

Academic Editor: Pijar Hatinurani
Merdeka

Received: 24/11/2023

Accepted: 17/12/2023

Published: 31/1/2024

Keywords: Konservasi, Lingkungan, *Marine Protected Area*

1. Introduction

Pengelolaan *marine protected area* dianggap sebagai pendorong utama yang mendasari penggunaan berkelanjutan sumber daya laut. Ide pengembangan yang sudah ada dilakukan secara bersama-sama tetapi masih kurang sederhana dan belum terlalu jelas. Pengembangan *marine protected area* di seluruh dunia sudah sangat serius dikarenakan apabila tidak serius akan merusak lingkungan. Terdapat hubungan perlindungan tentang kawasan lindung maupun konservasi biodiversitas dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Negara dengan pembangunan ekonomi bidang industri yang cepat dan masif selalu menyebabkan polusi sampai melakukan eksploitasi sumber daya yang berlebihan (Awan, 2013). Pembangunan tanpa perencanaan yang baik akan menghalangi sumber daya alam berkelanjutan dan menjadi merusak lingkungan. Pengelolaan *marine pro-*



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

tected area menjadi masalah yang kompleks untuk dibahas dikarenakan menyangkut kelestarian lingkungan beserta pengembangan pola pikir masyarakat termasuk kawasan lindung. Sudah banyak berdiri komunitas-komunitas perlindungan laut maupun Taman Nasional yang menjaga area untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya alam.

Terdapat peluang besar untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup masyarakat lokal sekaligus melestarikan dan meningkatkan habitat alami. Inisiatif konservasi bisa bersifat sosial karena memang dirancang untuk melindungi ekosistem alam dan keanekaragaman hayati, yang penting untuk sistem dan aktivitas yang mendukung kehidupan manusia. Berkelanjutan sosial pembangunan menggabungkan konsep kesetaraan, meningkatkan kapasitas, ketersediaan, keterlibatan, mobilitas ke atas dan harmoni sosial. Kawasan lindung harus mampu mempromosikan ekonomi, sosial dan perbaikan budaya bersama dengan konservasi. Perkembangan budaya adalah untuk mempromosikan keterlibatan penduduk asli, menggunakan budayawarisan sebagai cara untuk mengembangkan bakat komunitas dan semangat komunitas. Peningkatan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di pesisir dan pemberdayaan keuangan berperan sangat penting dalam perlindungan alam dan monumen budaya. Konservasi hasil sumber daya alam, mata pencaharian dan integrasi budaya saling terkait satu sama lain.

Kesadaran dan sikap lingkungan juga mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Membangun mental sebagai dimensi positif untuk sikap dan perilaku lingkungan terhadap masalah perubahan iklim dan pemanasan global. Peningkatan tingkat kesadaran lingkungan dapat dicapai melalui berbagi informasi di antara anggota komunitas. Selain itu, pengelolaan berbasis masyarakat adalah salah satu mekanisme yang telah menciptakan tingkat kesadaran tertentu dan dibawah perubahan sikap dan perilaku di antara orang-orang lokal

2. Materials and Methods

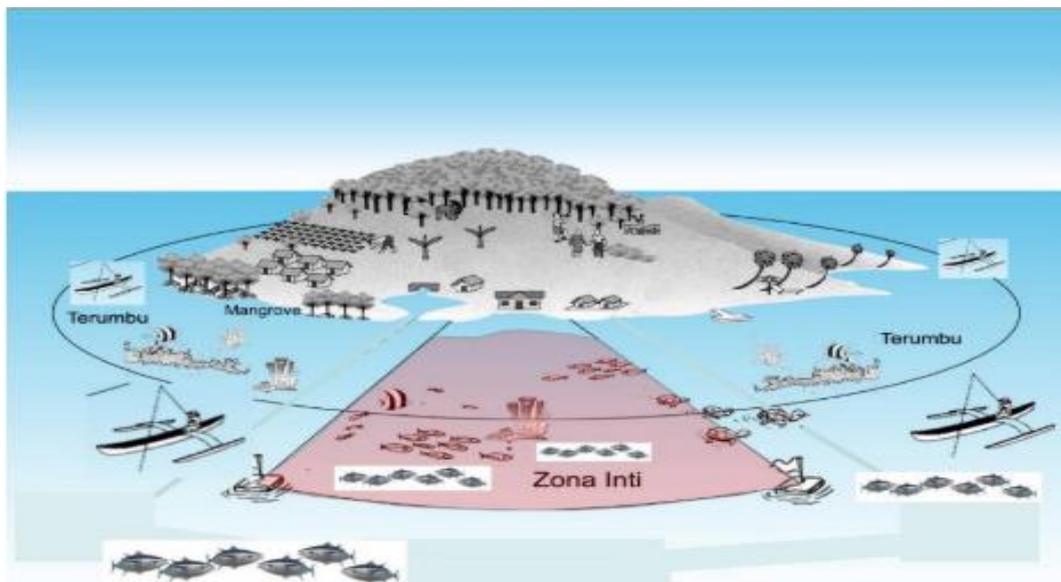
Potensi sumber daya pada suatu wilayah, merupakan kekayaan yang dikuasai negara dan perlu dijaga kelestariannya, serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sumber daya yang dimaksud yaitu: sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa lingkungan. Salah satu sumber daya yang penting untuk diatur tatat kelolanya adalah sektor perikanan. Potensi sumber daya ikan membutuhkan pembangunan sistem hukum secara holistik, agar dapat menciptakan ketertiban dalam manajemennya. Keberadaan kawasan konservasi sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya ikan, agar dapat berkontribusi terhadap masyarakat kelautan dan perikanan. Paradigma ekonomi dalam angka yang dijadikan dasar mengelola sumber daya ikan selama ini, harus segera diseimbangkan dengan menekan berbagai kemungkinan dampak negative (Pramoda & Khoshendrajana, 1969).

Marine Protected Area (MPA) merupakan salah satu instrumen yang didesain langsung pada pengendalian sumber daya alam, yaitu berupa penentuan suatu kawasan sebagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi laut (Marine Protected Area) ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang tidak hanya bersifat tangible (terukur), namun juga bersifat intangible (tidak terukur). Manfaat terukur biasanya digolongkan ke dalam manfaat kegunaan, baik yang dikonsumsi maupun tidak, sementara manfaat tidak terukur berupa manfaat non kegunaan yang lebih bersifat pemeliharaan ekosistem dalam jangka panjang (Dalimunthe et al., 2018). Prinsip dari Marine Protected Area adalah *spill over effect* atau dampak limpahan dimana pada kawasan yang dilindungi, stok ikan akan tumbuh dengan baik dan limpahan dari pertumbuhan ini akan mengalir ke wilayah di luar kawasan yang kemudian dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi sumber pertumbuhan di daerah yang dilindungi. Marine Protected Area memiliki banyak manfaat yang signifikan yang akan membantu pengelolaan sumberdaya kelautan dalam jangka panjang diantaranya manfaat biogeografi dan peningkatan produktifitas perairan (Elinur et al., 2010)

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi Perairan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dikategorikan menjadi 4, yaitu: (a) Taman Nasional Perairan, (b), Suaka Alam Perairan, (c) Taman Wisata Perairan, (d) Suaka Perikanan (Hukom et al., 2019). Kawasan konservasi perairan dibentuk untuk mencapai berbagai tujuan, di antaranya adalah untuk melindungi spesies dan habitat laut, melestarikan keanekaragaman hayati laut, memulihkan stok perikanan, mengelola kegiatan pariwisata dan meminimalkan konflik di antara pengguna sumberdaya yang beragam (Juliyanto et al., 2019).

Proses perlindungan, pengawetan dapat dilakukan di kawasan konservasi, taman hutan raya, dan taman wisata alam; mengingat kawasan konservasi itu adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan konservasi adalah dengan (3P), yaitu: (a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan, (b) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya, dan (c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dari ketiga strategi tersebut satu dengan lainnya sangat berkaitan, sehingga untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus dilakukan bersamaan (Santoso, 2013).

3. Results



Gambar 1. Kawasan Konservasi Perairan

Zona inti pada kawasan konservasi perairan merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan yang merupakan habitat biota perairan tertentu yang menjadi prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik yang mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya dan mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli sehingga kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia baik hutan mangrove, terumbu karang, maupun lamun (Febriani & Hafsar, 2020).

4. Discussion

Penetapan kawasan konservasi dapat efektif sebagai salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, kawasan ini merupakan tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Jika sumberdaya ikan dan lingkungannya lestari maka pemanfaatannya juga akan berlanjut terus dan akan menghasilkan sumberdaya yang melimpah. (Febriani & Hafsar, 2020). Keberadaan kawasan konservasi memegang peranan penting dalam mengimbangi kegiatan eksploitatif maupun terdegradasinya sumberdaya sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia. Berdasarkan tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan konservasi perairan dapat dibedakan menjadi: kawasan konservasi perairan tawar perairan payau dan perairan laut. Kawasan konservasi di wilayah perairan laut tersebut dikenal sebagai kawasan konservasi laut (KKL). Dalam pengembangannya kawasan konservasi perairan di wilayah laut yang dikembangkan oleh pemerintah daerah sering disebut sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) (Huda & Sari, 2017).

Tata urutan pengelolaan KKP di Indonesia umumnya terdiri dari 9 (sembilan) tahapan sebagai berikut: a) Seleksi calon kawasan konservasi perairan (KKP) b) Penetapan/deklarasi KKP secara formal c) Penentuan tata batas KKP d) Zonasi di dalam kawasan e) Rencana pengelolaan KKP f) Pembentukan Badan Pengelola KKP g) Implementasi pengelolaan KKP h) Monitoring Keberhasilan pengelolaan i) Pengelolaan adaptif Seleksi (Wiadnya, 2011).

Pada setiap KKL, ada beragam hal, seperti faktor-faktor biofisik, tata-kelola dan sosio-ekonomi, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja pengelolaan secara menyeluruh. Bila dirancang dengan benar dan dikelola secara efektif, KKL akan memainkan peranan penting dalam melindungi ekosistem dan pada beberapa kasus, terjadi peningkatan atau perbaikan perikanan pesisir dan laut. Karena peran ini, beragam lembaga dan badan pemerintah serta publik meletakkan harapan yang tinggi kepada KKL dalam memelihara atau memulihkan fungsi-fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati laut, disamping untuk meningkatkan kondisi sosio-ekonomi sebagai hasil dari peningkatan produksi perikanan yang meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan (Dangeubun et al., 2011)

Salah satu faktor kunci membangun pengelolaan kawasan konservasi adalah keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat mutlak diperlukan untuk keberhasilan pembangunan, pada umumnya dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat setiap proyek pembangunan harus dinilai tidak berhasil. Partisipasi masyarakat ini dapat diartikan sebagai kontribusi masyarakat dalam fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi. Sehingga peran ini dapat dilihat sebagai kompromi kewenangan dalam skema community based management (Danapraja, 2014).

Contoh:

- 4.1 Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Gili Sulat dan Gili Lawang termasuk dalam wilayah administrasi Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. KKLD Gili Sulat dan Gili Lawang terdiri dari mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Keberadaan KKLD Gili Sulat Gili Lawang memberikan manfaat yang dapat dikelompokkan menjadi manfaat langsung ekstraktif perikanan, manfaat sebagai penghalang dan manfaat nilai estetika dan keanekaragaman hayati (Huda & Sari, 2017).
- 4.2 Perairan Karimunjawa mempunyai keanekaragaman terumbu karang yang tinggi, sehingga dilindungi dalam suatu kawasan konservasi dalam bentuk taman nasional. Kawasan TNKJ dibagi menjadi sembilan zona yang memiliki fungsi dan peruntukan yang berbeda, yaitu zona inti, zona rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan darat, zona pemanfaatan wisata bahari, zona budidaya bahari, zona religi, zona rehabilitasi, dan zona tradisional perikanan. Habitat terumbu karang di TNKJ didominasi oleh karang tepi dan gosong karang dengan dinamika oseanografi yang tidak terlalu ekstrim, membuat kekayaan jenis ikan karang di TNKJ relatif tinggi (Yuliana et al., 2017).

- 4.3 Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Desa Uwedikan, awalnya, ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) melalui Keputusan Bupati Banggai No. 523/1209/Dislutkan tahun 2008 (Ariston et al., 2019).
- 4.4 Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan RI No. 36/KEPMEN- KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan, menetapkan sebagian wilayah perairan Raja Ampat sebagai Kawasan Konservasi Perairan. Selanjutnya kawasan tersebut dikelola sebagai Taman Wisata Perairan. Taman Wisata Perairan (TWP) adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi (Hukom et al., 2019).
- 4.5 Kawasan konservasi perairan Pulau Ay–Rhun, Kecamatan Banda Tengah, Provinsi Maluku merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Kawasan konservasi tersebut harus berfungsi untuk melindungi seluruh ekosistem pesisir di pulau kecil dan laut di sekitarnya yang memerlukan sebuah rencana prioritas pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan (Juliyanto et al., 2019)

5. Conclusions

Marine Protected Area (MPA) merupakan salah satu instrumen yang didesain langsung pada pengendalian sumber daya alam, yaitu berupa penentuan suatu kawasan sebagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi laut (Marine Protected Area) ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang tidak hanya bersifat tangible (terukur), namun juga bersifat intangible (tidak terukur). Manfaat terukur biasanya digolongkan ke dalam manfaat kegunaan, baik yang dikonsumsi maupun tidak, sementara manfaat tidak terukur berupa manfaat non kegunaan yang lebih bersifat pemeliharaan ekosistem dalam jangka Panjang. Marine Protected Area memiliki banyak manfaat yang signifikan yang akan membantu pengelolaan sumberdaya kelautan dalam jangka panjang diantaranya manfaat biogeografi dan peningkatan produktifitas perairan.

References

- Awan, A.G., 2013. Relationship between environment and sustainable economic development: a theoretical approach to environmental problems. *Int. J. Asian Soc. Sci.* 3 (3), 741–761.
- Ariston, S., Rembet, U. N. W. ., & Karwur, D. B. . (2019). Status and strategy of marine protected area in Uwedikan Village, Luwuk Timur District, Banggai Regency. *AQUATIC SCIENCE & MANAGEMENT*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.35800/jasm.6.1.2018.24813>
- Dalimunthe, D., Sulistiana, I., & Fahria, I. (2018). Analisis Ekonomi Sumber Daya Kawasan Konservasi Laut Marine Protected Area (MPA) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pengembangan Wisata Bahari. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 No 1, 25–31.
- Danapraja, S. (2014). Partisipasi Nelayan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Ciamis. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 8(1), 119–127. <https://doi.org/10.33378/jppik.v8i1.53>
- Dangeubun, F. D. ., Wiryawan, B., Mustarudin, & Purbayanto, A. (2011). Efektivitas Pengelolaan Perikanan Di Kawasan Konservasi Aru Tenggara. *Manajemen Sumberdaya Perairan*, 7(2), 49–60.
- Elinur, Priyarsono, D. S., Tambunan, M., & Firdaus, M. (2010). Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE). *Indonesian Journal of Agricultural (IJAE)*, 2, 97–119.
- Febriani, Z., & Hafsar, K. (2020). Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan. *Jurnal Maritim*, 1(2), 68–73.
- Huda, H. M., & Sari, Y. D. (2017). Pemanfaatan Dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Gili Sulat Dan Gili Lawang. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 5(2), 129. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v5i2.5796>

-
- Hukom, F. D., Yulianda, F., Bengen, D. G., & Kamal, M. M. (2019). Perikanan karang di Kawasan Konservasi Perairan Selat Dampier, Raja Ampat. *Jurnal Kebijakan Sosek Kelautan Dan Perikanan*, 9(2), 93–103.
- Juliyanto, E., Zairion, Krisanti, M., & Susanto, H. A. (2019). Analisis Prioritas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Ay-Rhun, Provinsi Maluku. *Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 11 No. 3(2), 721–734. <https://doi.org/http://doi.org/10.29244/jitkt.v11i1.25763>
- Pramoda, R., & Khoshendrajana, S. (1969). Kebijakan Pengelolaan Konservasi Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(2), 206–229. <https://doi.org/10.24258/jba.v8i2.89>
- Santoso, D. (2013). Model Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Untuk Meningkatkan Hasil Tangkapan Nelayan-Suatu Pendekatan Teoritis. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689–1699.
- Wiadnya, D. G. . (2011). Tahapan Menuju Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Indonesia. *Focus Gorup Discussion Tertanggal 20 Juli 2011, Di DKP Pasuruan*, 1–12.
- Yuliana, E., Boer, M., Fahrudin, A., & Kamal, M. M. (2017). Biodiversity of Reef Fishes in Marine Protected Area of Karimunjawa National Park. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 9(1), 29. <https://doi.org/10.28930/jitkt.v9i1.17915>